

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang telah kita ketahui, pajak merupakan suatu penghasilan atau penerimaan negara yang paling utama, sebab pajak digunakan untuk mendanai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri dapat dimisalkan seperti pinjaman luar negeri dan hibah, sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan non migas serta pajak. Dimana dengan adanya penerimaan pajak tersebut maka, suatu negara dapat memenuhi keperluan-keperluannya, baik untuk keperluan pembangunan negara seperti biaya pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah dan lain-lain. Untuk itu, tingkat kepatuhan atau ketaatan dalam membayar pajak dalam suatu negara dapat menjadi tolak ukur kemandirian negara tersebut, sebab dengan meningkatnya ketaatan membayar pajak itu sendiri juga dapat meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran serta rasa aman bagi seluruh masyarakatnya.

Pajak dipungut menurut Undang-undang yang berlaku, serta merupakan kewajiban bagi setiap masyarakat maupun suatu badan.yang mana pada penerapannya imbalan atau manfaat yang dirasakan secara tidak langsung oleh masyarakat, dibutuhkan beberapa tahun/bulan untuk bisa merasakan manfaatnya. Maka dari itu diperlukan tindakan tegas dari pihak Pemerintahan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

Pajak penghasilan adalah sebuah pajak negara yang dikenakan kepada setiap tambahan atau kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik itu berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, hal yang dapat menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Pajak penghasilan ini dikenakan terhadap penghasilan dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang diterima selama satu tahun pajak. Pajak penghasilan dikenakan kepada perusahaan yang mengelola barang dan jasa, jumlah penarikan yang diambil berdasarkan dari jumlah barang atau jasa yang diproduksi. Bagi seluruh badan usaha yang berada di Indonesia wajib memiliki nomor pokok wajib pajak seperti Perusahaan Terbatas (PT), Perusahaan Firma (FA), dan Perseroan Komanditer (CV). Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah proses pelaporan dan pengecekan data. Untuk menciptakan sistem perpajakan yang netral, stabil, adil dan memiliki kepastian hukum yang transparansi, dilakukan beberapa perubahan dan penyempurnaan terhadap undang-undang pajak penghasilan, perubahan terakhir mengenai peraturan pajak penghasilan ini dapat dilihat pada UU No. 36 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang perubahan keempat atas undang-undang No 7 Tahun 1983.

Sistem pemungutan pajak yang sudah dilaksanakan di Indonesia ada tiga, diantaranya *Self Assesment System*, *Official Assesment System* dan *With Holding System*. Dimana *Official Assesment System* adalah jumlah pajak yang terhutang ditentukan oleh aparat pajak atau fiskus. *Self Assesment System* memberikan kepercayaan bagi masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri sedangkan *With Holding System*, sistem

pemungutan pajaknya dilakukan dengan memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memungut besarnya pajak terhutang oleh wajib pajak.

Self Assesment System diberlakukan dalam perpajakan di Indonesia dimulai sejak tahun 1984, yang mana pada sistem ini menuntut wajib pajak untuk memiliki kesadaran atas kewajibannya yaitu melaporkan pajak terhutang. *Self Assesment System* memiliki perbedaan dengan *Official Assesment System* yang cara kerjanya masih bergantung dengan pemerintahan dalam penghitungan pajak terhutangnya, yang mana *Self Assesment System* memerlukan kejujuran dari wajib pajak itu sendiri dalam menghitung besarnya pajak terutang.

Self Assesment System dalam penerapannya dibutuhkan tingkat kesadaran yang tinggi dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, yang mana terkadang masih ditemui wajib pajak yang memiliki pajak yang belum dibayar. Dengan adanya permasalahan tersebut maka terdapat Direktorat Pajak (DJP) yang bertugas untuk mengatasinya, yang mana tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diantaranya, mengawasi administrasi, melayani, melakukan pembinaan atau sosialisasi peraturan perpajakan, pemeriksaan pajak serta pemberian sanksi bagi wajib pajak yang belum membayar kewajibannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan SPT tahunan pasal 25 tahun 2016-2018 pada KPP Pratama Malang Selatan?
2. Apa hambatan-hambatan yang terjadi di KPP Malang Selatan pada pelaporan SPT tahunan badan pasal 25 dan bagaimana cara mengatasinya?

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah maka penulis memfokuskan penelitian pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan SPT tahunan yang terdapat pada Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan SPT tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Malang.
- b. Menganalisis hambatan-hambatan yang terjadi pada KPP Pratama Malang Selatan dan cara mengatasinya.

2. Kegunaan Penelitian

1. Kontribusi Teoritis

a. Wajib Pajak Badan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi atau memberikan informasi pada wajib pajak badan mengenai pajak terutang yang harus dibayar serta diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak badan dalam membayar pajak terutangnya.

2. Kontribusi Praktis

a. Direktorat Jendral Pajak

Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang positif sehingga menjadi pembuat keputusan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

b. Kantor Pelayanan Pajak

Diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan penerimaan pajak serta segala hal yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan.